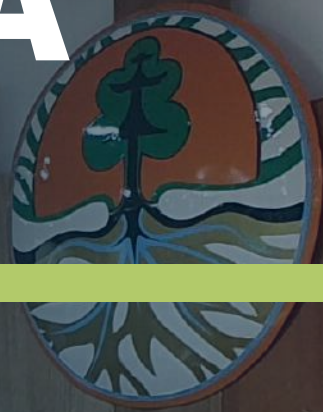


RENCANA KERJA 2022



INTELLIGEN
CENTER

Sekretariat Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan





SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR: SK.88/SET.10/PROEV/SET.1/11/2021

TENTANG
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I selaku penanggung jawab program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. bahwa berdasarkan Amar Ketiga Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.905/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2021 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022, diamanatkan penyusunan Rencana Kerja untuk Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana

Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
 11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1345);
16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/PHLHK/SET.10/REN.2/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 2. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/PHLHK/SET.10/SET.1/11/2021 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022;
 3. Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

SK.48/SET.10/KOTL/SET.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2022.
- KESATU : Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini bertujuan memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2020

 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

SUGENG PRIYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

Daftar Isi

Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal	ii
Daftar Isi	viii
Pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal	ix
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	2
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
D. Pengarusutamaan	6
E. Sarana dan Prasarana	7
II. Capaian Kinerja 2020 dan Prognosis 2021	8
A. Capaian Indikator dan Output Kegiatan 2020 dan Prognosis 2021	9
B. Serapan Anggaran 2020 dan Prognosis 2021	16
III. Rencana Kerja 2022	17
A. Dukungan terhadap Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Program Prioritas Nasional 2022	18
B. Kegiatan dan Rincian Kegiatan 2022	22
IV. Penutup	27
Lampiran	29

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2020	9
Tabel 2.2. Target dan Capaian Output Kegiatan 2020	10
Tabel 2.3. Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan 2020	10
Tabel 2.4. Prognosis Capaian Output Kegiatan 2021	12
Tabel 2.5. Unit Kegiatan Program dan Evaluasi 2021	13
Tabel 2.6. Unit Kegiatan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 2021	14
Tabel 2.7. Unit Kegiatan Keuangan dan Umum 2021	14
Tabel 2.8. Unit Kegiatan Hukum dan Kerja Sama Teknik 2021	15
Tabel 2.9. Prognosis Serapan Anggaran 2021	16
Tabel 3.1. Target Indikator Kinerja Kegiatan 2022	23
Tabel 3.2. Target Output Kegiatan 2022	23
Tabel 3.3. Unit Kegiatan Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik 2022	24
Tabel 3.4. Unit Kegiatan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 2022	25
Tabel 3.5. Anggaran Kegiatan 2022	26

Pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal



Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LHK

**Dr. Drs. Sugeng
Priyanto, M.Si**

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/PHLHK/SET.10/REN.2/9/2021 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 ini diharapkan dapat digunakan dalam menyusun RKA K/L Tahun 2022, pelaksanaan dan pengendalian Program Dukungan Manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara sinergis dan berkesinambungan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya oleh segenap aparat lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PENDAHULUAN

BAB I

A. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Setditjen Penegakan Hukum LHK dalam pelaksanaan tahun ketiga Rencana Strategis Setditjen Gakkum LHK Tahun 2020-2024. RENJA Setditjen Gakkum LHK tahun ini mendukung Rencana Kerja Tahunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bidang penegakan hukum LHK serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Pembangunan pada tahun 2020 mengalami tantangan berat dengan adanya pandemi Covid-19. Begitu pun dengan kegiatan penegakan hukum LHK yang harus tetap menangani berbagai tipologi kejahatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan di tengah pandemi Covid-19. Dengan adanya kemungkinan dampak pandemi yang masih berlanjut hingga tahun 2022, diperlukan adanya strategi dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan tetap produktif dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

RENJA Setditjen Gakkum LHK Tahun 2022 disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di lingkup Setditjen PHLHK dalam rangka mencapai sasaran program Dukungan Manajemen lingkup Ditjen Gakkum LHK.

Dokumen RENJA Setditjen Gakkum LHK Tahun 2022 memuat bab Pendahuluan, Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021 yang menjelaskan kinerja dan evaluasi untuk indikator kinerja kegiatan dan serapan anggaran baik untuk tahun 2020 serta prognosinya untuk tahun 2021, Rencana Kerja Tahun 2022 yang menjelaskan strategi yang akan dilaksanakan oleh Setditjen Gakkum LHK dalam dukungannya terhadap program kerja KHLK dan pembangunan nasional, serta Penutup yang berisi garis besar dan harapan tentang pelaksanaan RENJA Setditjen Gakkum LHK Tahun 2022.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan.



- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
- d. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja, pembinaan sumber daya penegak hukum, pelayanan profesi sumber daya penegak hukum, serta sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

C. Struktur Organisasi dan SDM

1. Struktur Organisasi Setditjen PHLHK

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum

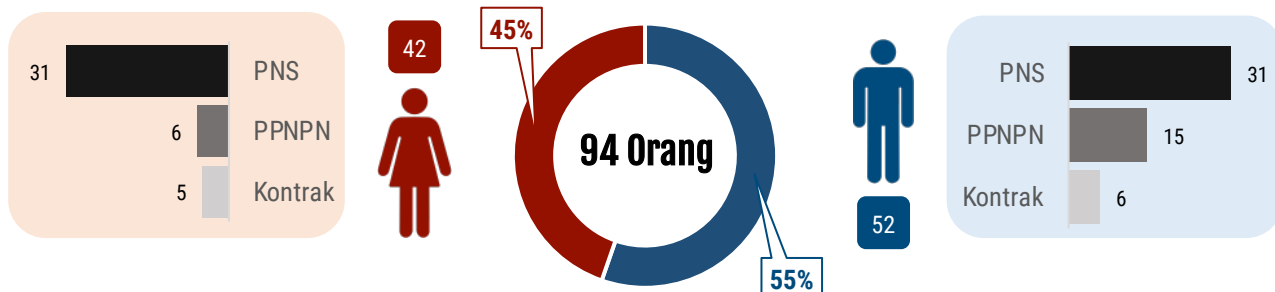
Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Direktorat Jenderal

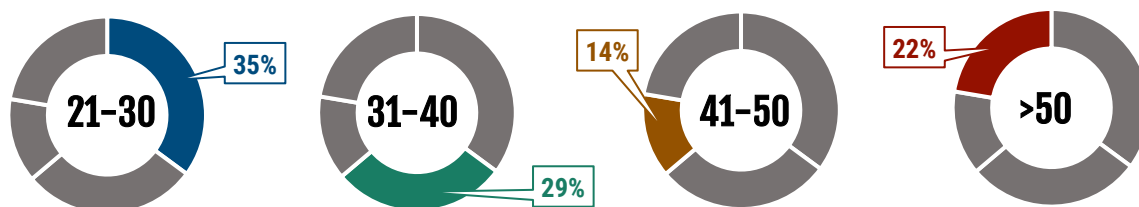
2. Sumber Daya Manusia Setditjen Penegakan Hukum LHK

Berikut merupakan komposisi sumber daya manusia di lingkup Setditjen Gakkum LHK berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Tertampil pula komposisi pegawai dengan jabatan fungsional yang ada di lingkup Setditjen Gakkum LHK.

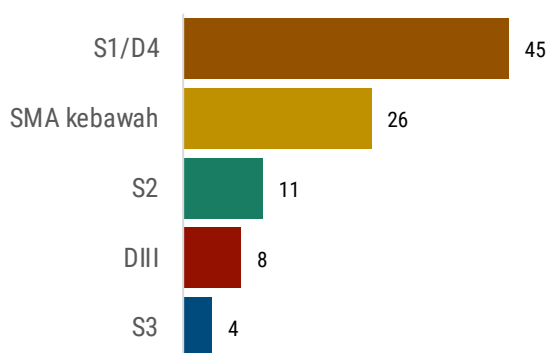
JENIS KELAMIN



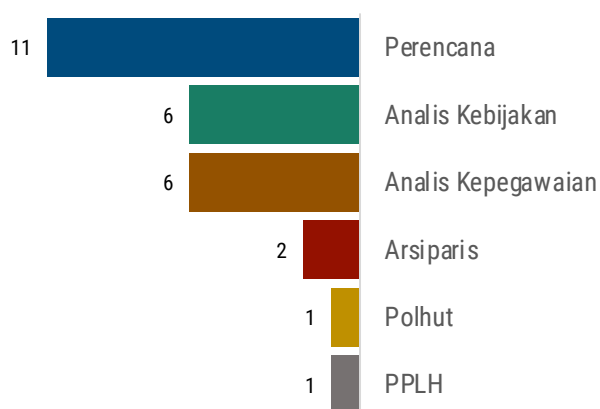
USIA



PENDIDIKAN



JABATAN FUNGSIONAL



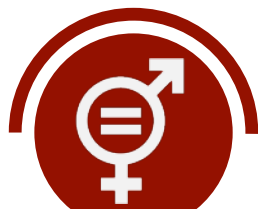
Proporsi SDM berdasarkan jenis kelamin hampir seimbang dengan jumlah SDM laki-laki sebanyak 55% dan perempuan 45%. Dari segi usia, proporsi terbanyak pada kategori usia 21-30 tahun sebanyak 35%. SDM lulusan S1/D4 mendominasi dari sisi pendidikan. Saat ini SDM jabatan fungsional memiliki porsi sebanyak 29% dari total SDM di Setditjen Penegakan Hukum LHK dengan jabatan terbanyak adalah fungsional Perencana.

D. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 merupakan bentuk pembangunan yang inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Keempat pengarusutamaan tersebut yaitu pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan gender, pengarusutamaan modal sosial dan budaya, serta pengarusutamaan transformasi digital.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan. Ditjen PHLHK mendukung tujuan 15 (utama) dan juga tujuan 5, 6, 13 dan 14.



GENDER

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Upaya Ditjen Gakkum LHK dalam PUG dituangkan dalam Road Map PUG TA 2020-2024 : Jalan Menuju Kesetaraan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) juga tercermin dengan adanya tagging tematik gender dalam rencana kerja yang disusun.

Di lingkup Setditjen Gakkum LHK, upaya mendukung PUG dilakukan dengan membentuk Sub Kelompok Kerja Gender dengan penganggaran sebesar **Rp179.048.000**.

MODAL SOSIAL DAN BUDAYA

Pengarusutamaan modal sosial dan budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), keraifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional.



TRANSFORMASI DIGITAL

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dengan strategi dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data.

Di lingkup Ditjen Gakkum LHK, transformasi digital dilakukan melalui strategi ekosistem penegakan hukum dengan memperkuat sistem dukungan pengambilan keputusan. Keputusan yang cepat dan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan didapat dengan adanya *big data system*, *Artificial Intelligence* dan dukungan teknologi.

E. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kerja di lingkup Setditjen Gakkum LHK, sarana dan prasarana disediakan bagi SDM sesuai dengan kebutuhan dan fungsi pelaksanaan tugas. Berikut adalah beberapa sarana penting yang tersedia di Setditjen Gakkum LHK.



5 PC Unit
1 Workstation



7 Camera Film



13 Sepeda Motor
2 Sepeda Motor Patroli



3 Camera Udara



3 Jeep
26 Pick Up



29 Camera Digital
2 Camera Conference



94 Laptop



6 Target Drone



CAPAIAN DAN PROGNOSIS

BAB II

A. Capaian Indikator dan Output 2020 dan Prognosis 2021

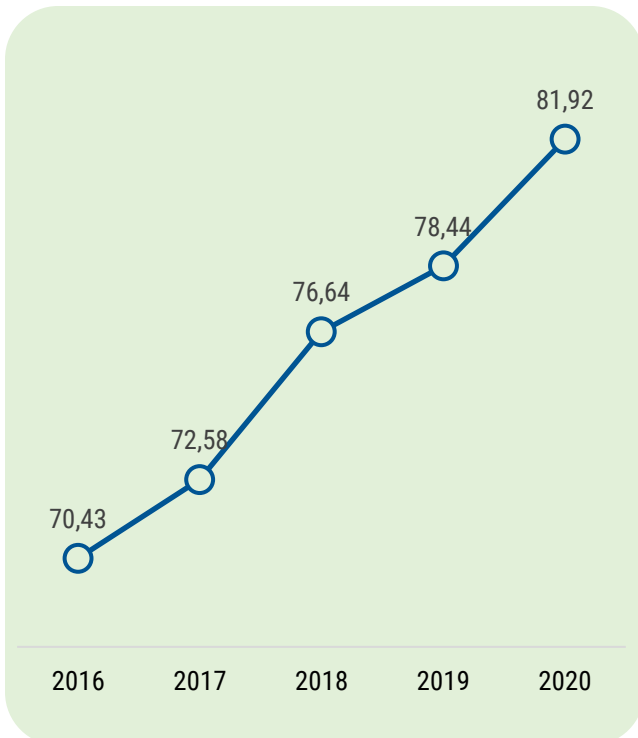
1. Capaian Indikator dan Output Kegiatan 2020

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen Gakkum LHK

Tabel 2.1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2020

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)	Satuan
SAKIP Ditjen Gakkum LHK	72	81,92	113	Poin
Maturitas SPIP Ditjen Gakkum LHK	3	3,3955	113	Level
Laporan Keuangan Ditjen Gakkum LHK	1	1	100	Laporan



Tren Nilai SAKIP Ditjen PHLHK 2016-2020

Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Gakkum LHK pada tahun 2020 mencapai 81,92 poin dengan capaian 113% dari target sehingga mendapat predikat A. Nilai SAKIP selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren positif seperti terlihat pada *chart* disamping. Meski menunjukkan hasil yang baik, masih ada perbaikan yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai hasil yang lebih untuk tahun 2021.

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Gakkum LHK pada tahun 2020 yaitu 3,3955 pada level 3. Meski mencapai target namun bila dibandingkan dengan tahun 2019 nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,8855 dari nilai 4,281.

Evaluasi mengenai capaian indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2020 dapat didalami pada Laporan Kinerja Setditjen Gakkum LHK Tahun 2020 yang dapat diakses pada link berikut

<http://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/269>

Tabel 2.2. Target dan Capaian *Output* Kegiatan 2020

Output	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)	Satuan
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	1	100	Layanan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	100	Layanan
Layanan Perkantoran	1	1	100	Layanan

2. Prognosis Indikator dan *Output* Kegiatan 2021

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen Gakkum LHK

Tabel 2.3. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Prognosis 2021	Capaian (%)	Satuan
SAKIP Ditjen Gakkum LHK	74	82	110	Poin
Maturitas SPIP Ditjen Gakkum LHK	3	3	100	Level
Laporan Keuangan Ditjen Gakkum LHK	1	1	100	Laporan

Pada tahun 2021 ini penilaian maturitas SPIP mengalami penyesuaian dengan terbitnya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penyesuaian ini menjadikan penilaian SPIP tidak hanya meliputi nilai unsur-unsur SPIP, namun juga mengintegrasikan Manajemen Resiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

Pada tahun 2020, dengan diberlakukannya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) untuk rencana kerja tahun 2021, maka terjadi beberapa penyesuaian atas struktur rencana kerja yang berlaku. Redesain ini melingkupi redesain program, redesain kegiatan, dan redesain output. Berikut beberapa perubahan atas rencana kerja tahun 2021 dibanding rencana kerja tahun 2020.

2020

Program merupakan kebijakan yang dilaksanakan tiap Eselon I dengan nomenklatur nama tiap unit kerja Eselon I

Kegiatan mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh tiap unit kerja Eselon II

Keluaran terdiri dari Output dan Suboutput dengan komponen sebagai aktivitas/masukan

Lokasi berada pada Suboutput

2021

Program merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja Eselon I dengan nomenklatur sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional

Kegiatan mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dan dapat dilaksanakan oleh lebih dari satu unit kerja Eselon II

Keluaran dikumpulkan dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) dengan komponen sebagai aktivitas/masukan

Lokasi berada pada RO dan komponen

Dengan adanya RSPP tersebut, maka program yang didukung oleh Ditjen Gakkum LHK yang semula Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka pada tahun 2021 Ditjen Gakkum LHK mendukung 3 (tiga) program yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Dukungan Manajemen.

Setdijen Gakkum LHK sendiri mendukung program Dukungan Manajemen yang pelaksanaan ada di semua satuan kerja lingkup Ditjen Gakkum HLHK dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK.

Output untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen Gakkum LHK menjadi seperti tertera pada tabel di bawah berikut.

Tabel 2.4. Prognosis Capaian *Output* Kegiatan 2021

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target 2021	Prognosis 2021	Capaian (%)	Satuan
EAA. Layanan Perkantoran		10	10	100	Layanan
	001. Layanan Perkantoran Setditjen Penegakan Hukum LHK	1	1	100	Layanan
	002. Layanan Perkantoran Dit.PPSA	1	1	100	Layanan
	003. Layanan Perkantoran Dit. PSLH	1	1	100	Layanan
	004. Layanan Perkantoran Dit. PPH	1	1	100	Layanan
	005. Layanan Perkantoran Dit. PHP	1	1	100	Layanan
	006. Layanan Perkantoran UPT	5	5	100	Layanan
EAC. Layanan Umum		6	6	100	Layanan
	001. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	1	100	Layanan
	002. Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT	5	5	100	Layanan
EAD. Layanan Sarana Internal		1	1	100	Layanan
	001. Layanan Sarana dan Prasarana Internal Kantor Pusat	1	1	100	Layanan



Pada tahun 2021, susunan organisasi di lingkup Setditjen Gakkum LHK terdiri dari empat bagian yaitu Bagian Program dan Evaluasi, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Bagian Keuangan dan Umum, serta Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik. Tiap bagian memiliki indikator unit kegiatan tersendiri dengan target dan prognosis untuk tahun 2021 seperti disajikan berikut.

Tabel 2.5. Unit Kegiatan **Program dan Evaluasi** 2021

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target 2021	Prognosis 2021	Satuan
Tersedianya dokumen rencana program Ditjen Gakkum LHK	Jumlah dokumen RENJA Ditjen Gakkum LHK	1	1	Dokumen
	Jumlah dokumen RENJA Unit Kerja	10	10	Dokumen
	Jumlah dokumen Rencana Aksi	10	10	Dokumen
Tersedianya dokumen anggaran Ditjen Gakkum LHK	Jumlah dokumen RKAKL	6	6	Dokumen
	Jumlah dokumen revisi RKAKL	12	12	Dokumen
	Peraturan Standar Kegiatan dan Biaya	1	1	Dokumen
	Peraturan Standar Biaya Teknis	1	1	Dokumen
Terselenggaranya dukungan program dan anggaran Gakkum LHK	Jumlah bahan kerja pimpinan Gakkum LHK	12	12	Laporan
	Raker Penegakan Hukum	2	2	Laporan
Tersedianya dokumen pelaporan lingkup Ditjen Gakkum LHK	Jumlah dokumen Laporan Kinerja lingkup Ditjen Gakkum LHK	11	11	Dokumen
	Jumlah dokumen Desain SPIP lingkup Ditjen Gakkum LHK	10	10	Dokumen
	Jumlah dokumen Laporan Tahunan lingkup Ditjen Gakkum LHK	11	11	Dokumen
Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye	Jumlah berita media massa mengenai kegiatan Gakkum LHK kepada masyarakat	100	80	Berita
	Jumlah media kampanye/pameran Gakkum LHK	10	10	Pameran
Tercapainya data dan informasi penegakan hukum	Jumlah satuan kerja yang tekoneksi dengan sistem data dan informasi terpusat	4	4	Satuan Kerja
	Jumlah publikasi melalui media sosial Gakkum (FB, IG, Twitter, Youtube, dan Website)	500	1800	Posting

Tabel 2.6. Unit Kegiatan **Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana** 2021

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target 2021	Prognosis 2021	Satuan
Meningkatnya daya saing sumber daya manusia Ditjen Penegakan Hukum LHK	Tersedianya Polisi Kehutanan dalam mendukung Gakkum LHK	732	655	Orang
	Tersedianya PPLH untuk memenuhi kebutuhan pengawasan lingkungan hidup	173	162	Orang
	Tersedianya PPNS untuk memenuhi kebutuhan penyidikan	236	203	Orang
	Jumlah sumber daya manusia PHLHK yang meningkat kompetensinya	1.409	1.287	Orang
Tersusunnya struktur organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif, dan efisien	Terlaksananya penyempurnaan struktur organisasi Gakkum LHK	1	1	Usulan
	Terlaksananya penyempurnaan ketatalaksanaan lingkup Ditjen Gakkum LHK	1	1	Dokumen

Tabel 2.7. Unit Kegiatan **Kuangan dan Umum** 2021

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target 2021	Prognosis 2021	Satuan
Meningkatnya efektivitas administrasi keuangan	Opini WTP untuk laporan keuangan	1	1	Dokumen
	Pengelola Anggaran Terakreditasi sesuai dengan PUU	10	10	Orang
Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan	Identifikasi register asset secara elektronik	1	1	Dokumen
	Jumlah sarana dan peralatan LHK terdistribusi di satuan kerja dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK	1.707	1.750	Unit
	Penetapan Standar Sarana dan Prasarana	1	1	Dokumen SK
	Penataan dokumentasi berdasarkan aplikasi SIK	1	1	Dokumen
	Terlaksananya pengelolaan surat/dokumen dinas	1	1	Laporan
	Tersedianya Layanan Rumah Tangga Pimpinan	1	1	Laporan



Tabel 2.8. Unit Kegiatan Hukum dan Kerja Sama Teknik 2021

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target 2021	Prognosis 2021	Satuan
Tersedianya aturan dan NSPK	Jumlah Rancangan Peraturan Perundangan-Undangan	3	3	Dokumen
	Jumlah NSPK	2	2	Orang
Tersedianya Rumusan Kajian Hukum Ditjen Gakkum LHK	Jumlah Rumusan Kajian Hukum	5	5	Dokumen
Tersedianya Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum	5	5	Dokumen Putusan
Terselenggaranya Kerjasama Teknis dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Gakkum LHK	Jumlah Kerjasama Teknik Dalam Negeri terkelola	12	12	Dokumen/ draft kerjasama
	Jumlah Kerjasama Teknik Luar Negeri terkelola	5	5	Dokumen/ draft kerjasama

B. Capaian Serapan Anggaran 2020 dan Prognosis 2021

1. Capaian Serapan Anggaran 2020

Capaian serapan anggaran untuk lingkup Setditjen Gakkum LHK tahun 2020 sebesar 98,01% yaitu sejumlah Rp50.167.349.000 dari target Rp51.187.040.000 dengan dengan tingkat efisiensi 1,03. Tingkat efisiensi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Setditjen Gakkum LHK efisien terhadap capaian kinerja yang ditunjukkan dengan rasio > 1. Chart berikut menunjukkan perbandingan anggaran dan serapan dari tahun 2016 – 2020 di lingkup Setditjen Gakkum LHK.

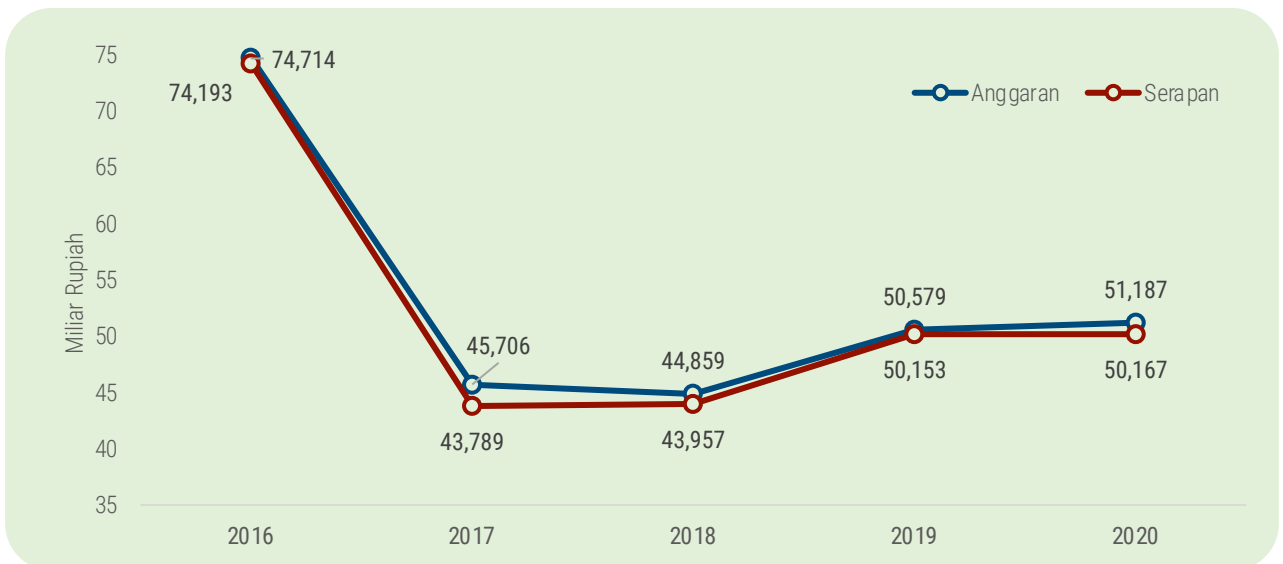


Chart 2.2. Tren Target dan Serapan Anggaran Setditjen PHLHK Tahun 2016-2020

2. Prognosis Serapan Anggaran 2021

Dengan adanya pandemi yang melanda Indonesia dari awal tahun 2020, selama tahun 2021 ini *refocusing* dilaksanakan beberapa kali, sehingga baik target maupun anggaran mengalami beberapa kali penyesuaian.

Tabel 2.9. Prognosis Serapan Anggaran 2021

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran ('000)			%
	Semula	Refocusing IV	Prognosis	
EAA. Layanan Perkantoran	144.752.762	155.201.127	155.025.750	99,89%
EAC. Layanan Umum	17.419.465	15.120.179	15.118.213	99,99%
EAD. Layanan Sarana Internal	3.842.544	2.968.000	2.967.970	100,00%
Total	166.019.771	173.289.306	173.111.933	99,90%

RENCANA KERJA

BAB III

A. Dukungan Program KLHK dan Program PN

Pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan pada pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada pembangunan ke depan yang lebih baik (*Build Forward Better*) dengan tema **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"**. Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas dan daya saing SDM. Arah kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung tema pembangunan tersebut melalui pemulihan daya beli usaha, diversifikasi ekonomi, reformasi perlindungan sosial, reformasi peningkatan kualitas SDM, reformasi iklim investasi, dan reformasi kelembagaan.

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, 7 agenda pembangunan Prioritas Nasional yang telah tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.



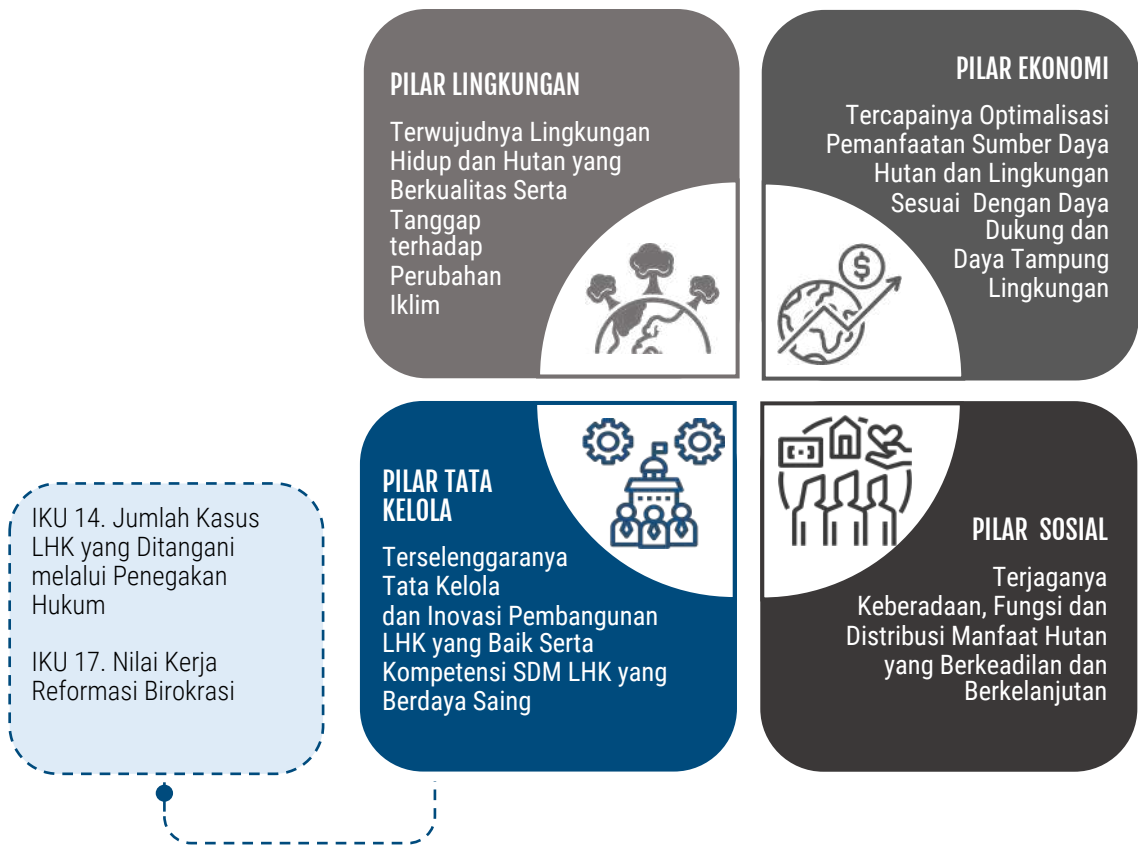
Rencana Kerja Ditjen Penegakan Hukum LHK untuk Tahun 2022 mengikuti arahan Prioritas Nasional yang tercantum di dalam RKP Tahun 2022, yaitu mendukung pencapaian sasaran yang akan diwujudkan Prioritas Nasional 6 (Enam) dalam rangka Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim.



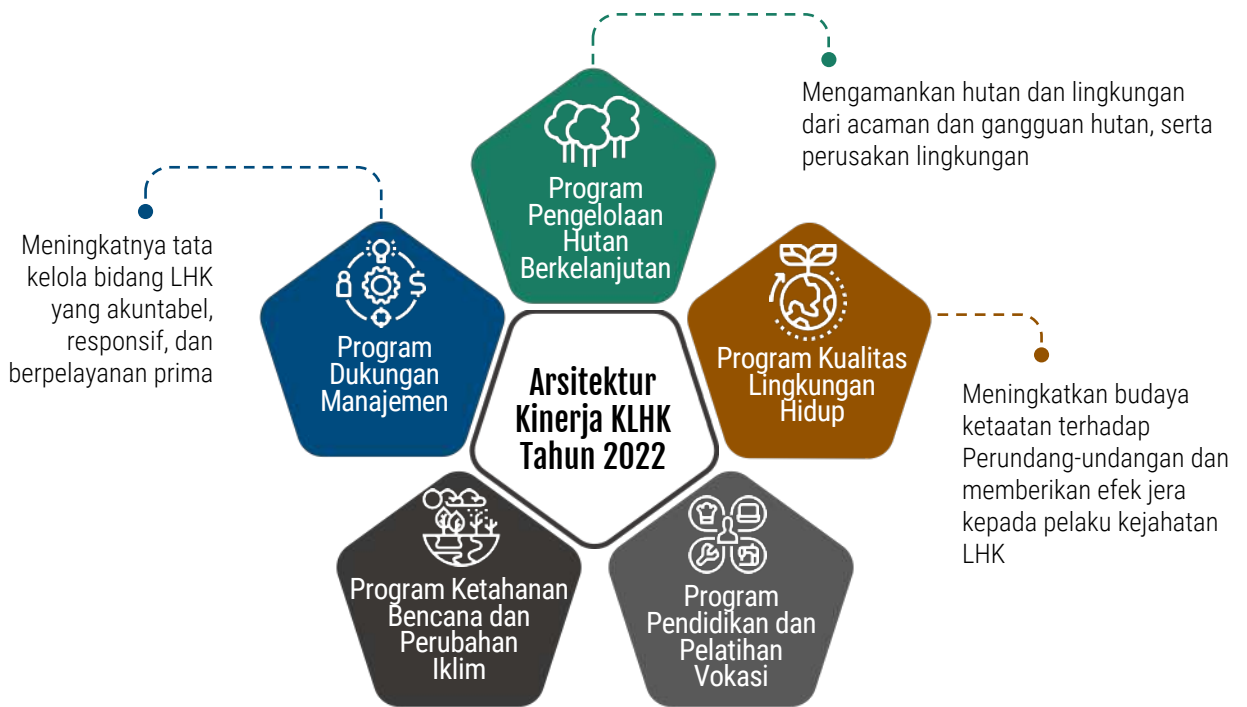
Dalam mendukung Prioritas Nasional 6 (PN), Ditjen Gakkum LHK mendukung Program Prioritas (PP) 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam mewujudkan arah kebijakan ini, strategi yang didukung oleh Ditjen Gakkum LHK adalah Kegiatan Prioritas (KP) 4 Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Ditjen Gakkum LHK mendukung pelaksanaan KP 4 melalui Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) 2 Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan melalui kegiatan Pencegahan dan Pengamanan LHK dan kegiatan Penanganan Pengaduan dan Penanganan Administrasi LHK, serta Pro-PN 3 Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan kegiatan Penegakan Hukum Pidana LHK.

Setditjen Gakkum LHK yang memiliki tugas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen Gakkum LHK, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung program Prioritas Nasional.

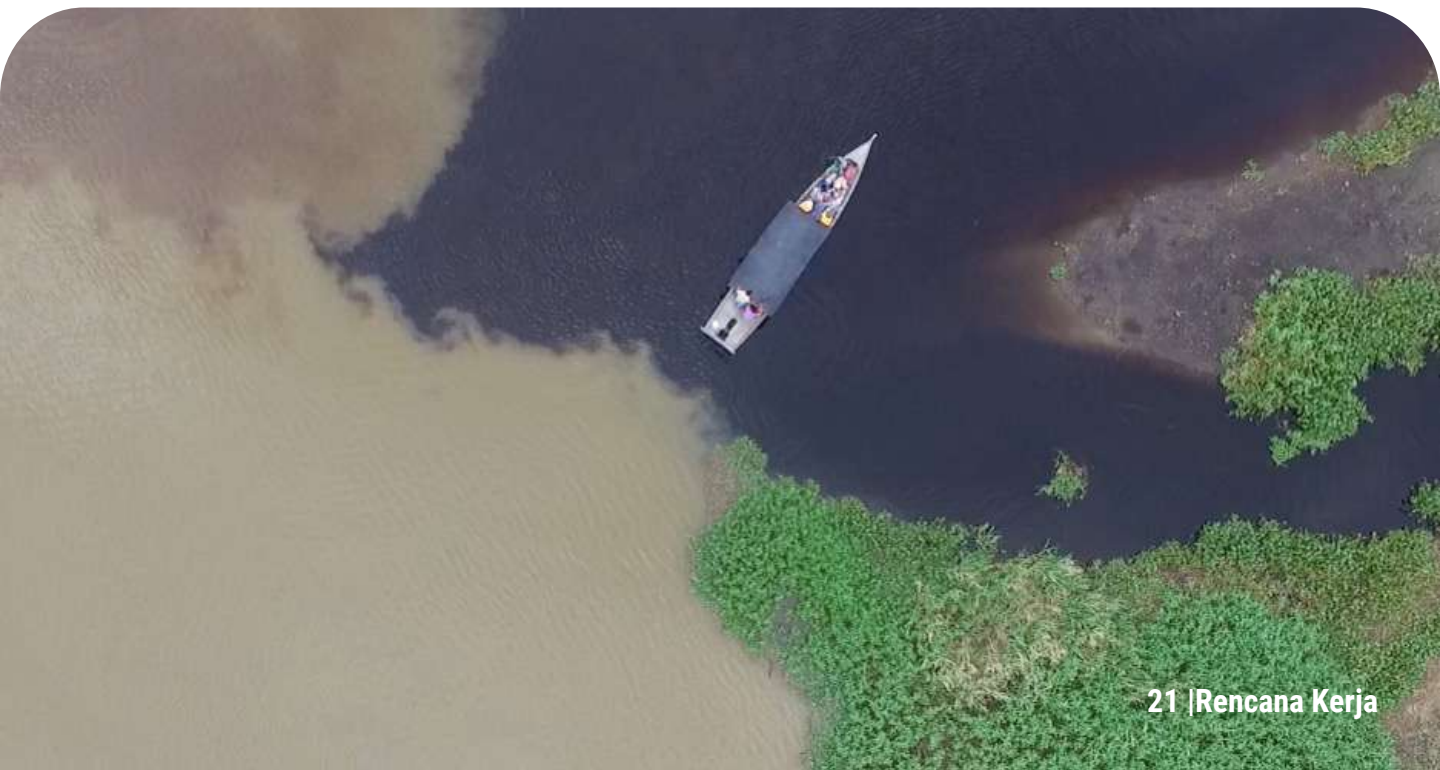
Dalam mendukung tema RKP Tahun 2022 dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dan mencapai sasaran pembangunan nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah merumuskan sasaran yang mengacu pada pilar pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK Tahun 2020-2024. Sasaran strategis pada masing-masing pilar tersebut seperti pada gambar berikut.



Ditjen Gakkum LHK mendukung Pilar Tata Kelola dengan Sasaran Strategis 4 Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik Serta Kompetensi Sumber Daya Manusia LHK yang Berdaya Saing dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) 14 Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum dan IKU 17 Nilai Kerja Reformasi Birokrasi melalui dukungan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Penegakan Hukum LHK.

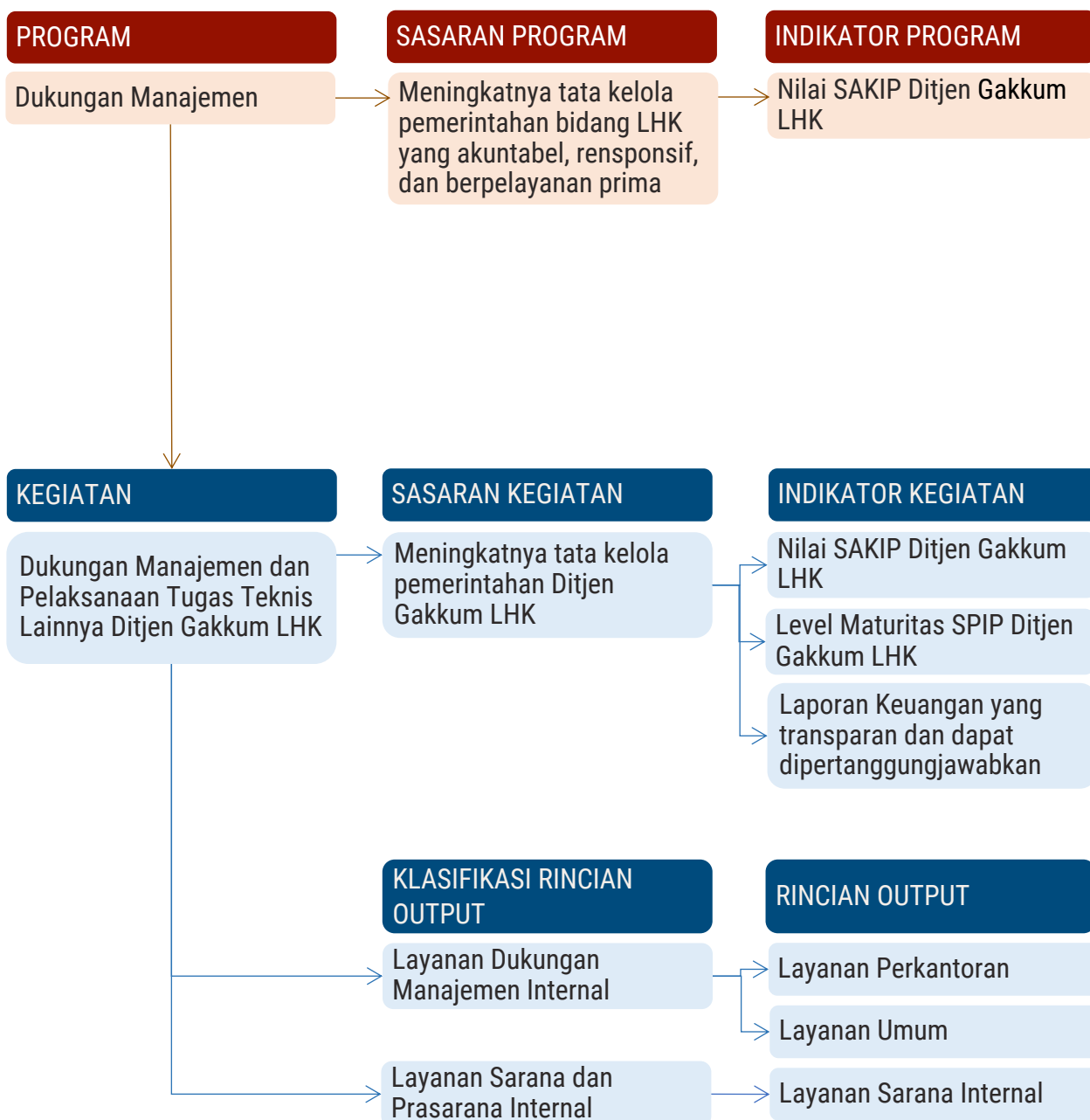


Dalam arsitektur kinerja yang terbaru, KLHK mendukung lima program seperti tertampil pada gambar di atas. Ditjen Gakkum LHK mendukung tiga dari lima program tersebut, yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup, dan Program Dukungan Manajemen. Setditjen Penegakan Hukum LHK sendiri bertanggung jawab terhadap pencapaian program Dukungan Manajemen di lingkup Ditjen Gakkum LHK dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK.



B. Kegiatan dan Rincian Kegiatan

Untuk mencapai tujuan Program Dukungan Manajemen, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Ditjen Gakkum LHK adalah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya lingkup Ditjen Gakkum LHK. Berikut merupakan struktur rencana kerja yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2022 yang mengacu pada Arsitektur Kinerja KLHK Tahun 2022.



1. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK tidak mengalami perubahan signifikan.

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Ditjen Gakkum LHK

Tabel 3.1. Target Indikator Kinerja Kegiatan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Satuan
Nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK	76	Poin
Level Maturitas SPIP Ditjen Gakkum LHK	3	Level
Laporan Keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	1	Laporan

2. Output Kegiatan Tahun 2022

Output untuk kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen, pada tahun 2022 mengalami beberapa penyesuaian. Program Dukungan Manajemen sebagai program yang diusung oleh semua Eselon I, memiliki nomenklatur *output* yang bersifat generik. Berikut adalah *output* kegiatan beserta target untuk tahun 2022.

Tabel 3.2. Target *Output* Kegiatan 2022

Klasifikasi Rincian <i>Output</i> (KRO)	Rincian <i>Output</i> (RO)	Target 2022	Satuan
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal		12	Layanan
	994. Layanan Perkantoran	6	Layanan
	996. Layanan Umum	6	Layanan
EBB. Layanan Sarana Internal		1	Unit
	951. Layanan Sarana Internal	1	Unit

Untuk Tahun 2022, sesuai dengan susunan organisasi terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen Gakkum LHK terdiri dari dua bagian yaitu Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama teknik, serta Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Tiap bagian memiliki indikator unit kegiatan tersendiri dengan target untuk tahun 2022 seperti disajikan berikut.

Tabel 3.3. Unit Kegiatan Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik 2022

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target 2022	Satuan
Tersedianya dokumen rencana program Ditjen Gakkum LHK	Jumlah dokumen RENJA Ditjen Gakkum LHK	1	Dokumen
	Jumlah dokumen RENJA Unit Kerja	10	Dokumen
	Jumlah dokumen Rencana Aksi	10	Dokumen
	Jumlah dokumen Revisi Renstra Ditjen Gakkum LHK	1	Dokumen
	Jumlah dokumen Revisi Renstra Unit Kerja	10	Dokumen
Tersedianya dokumen anggaran Ditjen Gakkum LHK	Jumlah dokumen RKAKL	6	Dokumen
	Jumlah dokumen revisi RKAKL	12	Dokumen
	Peraturan Standar Kegiatan dan Biaya	1	Dokumen
	Peraturan Standar Biaya Teknis	1	Dokumen
Terselenggaranya dukungan program dan anggaran Gakkum LHK	Jumlah bahan kerja pimpinan Gakkum LHK	12	Laporan
	Raker Penegakan Hukum	2	Laporan
Tersedianya dokumen pelaporan lingkup Ditjen Gakkum LHK	Jumlah dokumen Laporan Kinerja lingkup Ditjen Gakkum LHK	11	Dokumen
	Jumlah dokumen Desain SPIP lingkup Ditjen Gakkum LHK	10	Dokumen
	Jumlah dokumen Laporan Tahunan lingkup Ditjen Gakkum LHK	11	Dokumen
Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye	Jumlah berita media massa mengenai kegiatan Gakkum LHK kepada masyarakat	100	Berita
	Jumlah media kampanye/pameran Gakkum LHK	10	Pameran
Tercapainya data dan informasi penegakan hukum	Jumlah satuan kerja yang tekoneksi dengan sistem data dan informasi terpusat	5	Satuan Kerja
	Jumlah publikasi melalui media social Penegakan Hukum (FB, IG, Twitter, Youtube, dan Website)	500	Posting
Tersedianya aturan dan NSPK	Jumlah Rancangan Peraturan Perundangan-Undangan	2	Dokumen
	Jumlah NSPK	1	Dokumen
Tersedianya Rumusan Kajian Hukum Ditjen Gakkum LHK	Jumlah Rumusan Kajian Hukum	4	Dokumen
Tersedianya Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum	4	Dokumen Putusan
Terselenggaranya Kerjasama Teknis dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Gakkum LHK	Jumlah Kerjasama Teknik Dalam Negeri terkelola	16	Dokumen/ draft kerjasama
	Jumlah Kerjasama Teknik Luar Negeri terkelola	2	Dokumen/ draft kerjasama

Tabel 3.4. Unit Kegiatan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 2022

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target 2022	Satuan
Meningkatnya efektivitas administrasi keuangan	Opini WTP untuk laporan keuangan	1	Dokumen
	Pengelola Anggaran Terakreditasi sesuai dengan PUU	10	Orang
Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtangaan, dan pengelolaan perlengkapan	Identifikasi register asset secara elektronik	1	Dokumen
	Jumlah sarana dan peralatan LHK terdistribusi di satuan kerja dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK	1.365	Unit
	Penetapan Standar Sarana dan Prasarana	1	Dokumen SK
	Penataan dokumentasi berdasarkan aplikasi SIK	1	Dokumen
	Terlaksananya pengelolaan surat/dokumen dinas	1	Laporan
	Tersedianya Layanan Rumah Tangga Pimpinan	1	Laporan
Meningkatnya daya saing sumber daya manusia Ditjen Gakkum LHK	Tersedianya Polisi Kehutanan dalam mendukung Gakkum LHK	785	Orang
	Tersedianya PPLH untuk memenuhi kebutuhan pengawasan lingkungan hidup	188	Orang
	Tersedianya PPNS untuk memenuhi kebutuhan penyidikan	266	Orang
	Jumlah sumber daya manusia Gakkum LHK yang meningkat kompetensinya	1.492	Orang
Tersusunnya stuktur organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif, dan efisien	Terlaksananya penyempurnaan ketatalaksanaan lingkup Ditjen Gakkum LHK	1	Dokumen

3. Pendanaan Kegiatan Tahun 2022

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya tahun 2022, diperlukan anggaran dengan komposisi pada tabel berikut. Sumber pendanaan untuk kegiatan ini berasal dari rupiah murni (RM) sebesar 99,59% dan PNBPN sebesar 0,41%.

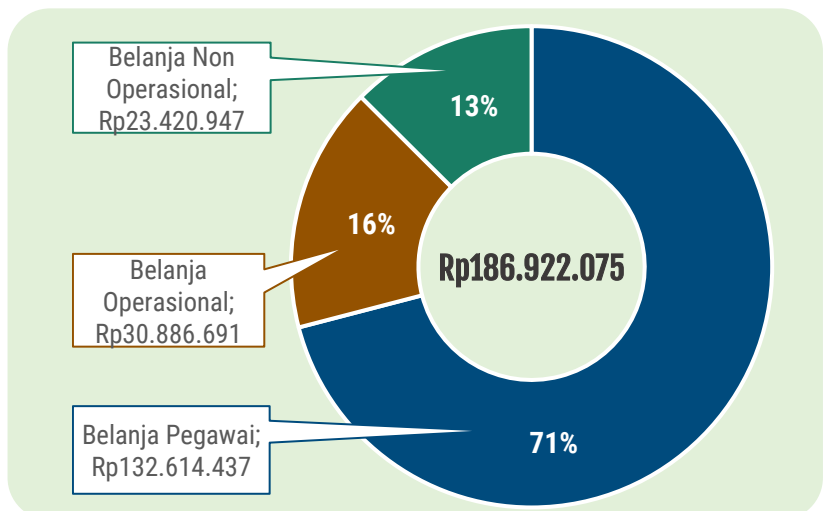


Chart 3.1. Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022

Tabel 3.5. Anggaran Kegiatan 2022

Klasifikasi	Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen	Target 2022	Satuan	RM ('000)	PNBP ('000)	Total Anggaran ('000)
EBA.				12	Layanan			183.096.675
Layanan Dukungan Manajemen Internal	994.	Layanan Perkantoran		6	Layanan	163.501.128		163.501.128
			001. Gaji dan Tunjangan			132.614.437		132.614.437
			002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor			30.886.691		30.886.691
	996.	Layanan Umum		6	Layanan	18.845.547	750.000	19.595.547
			063. Layanan Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik			6.876.494	400.000	7.276.494
			064. Layanan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana			6.969.053	350.000	7.319.053
			062. Layanan Dukungan Manajemen Satker			5.000.000		5.000.000
EBB.				1	Unit	3.825.400		3.825.400
Layanan Sarana Internal	951.	Layanan Sarana Internal		1	Unit	3.825.400		3.825.400
			051. Pengadaan Kendaraan Bermotor			1.125.400		1.125.400
			052. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			600.000		600.000
			053. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			600.000		600.000
			054. Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan			1.500.000		1.500.000
					Total	186.172.075	750.000	186.922.075

PENUTUP

BAB IV



Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 perlu dilaksanakan dan dikawal bersama untuk mendukung pembangunan nasional dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Rencana Kerja Tahun 2022 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2021, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2022.

Dengan demikian, Rencana Kerja Tahun 2022 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Setditjen Gakkum LHK. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya didalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja. Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal KLHK diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam LAKIP Kementerian LHK di tahun 2022.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2022
Dukungan Manajemen	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	76 Poin

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	76 Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3 Level
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Laporan

Lampiran 2. Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Gakkum LHK

Klasifikasi	Rincian Output (RO)	Lokasi	Komponen	Target 2022	Satuan	Anggaran ('000)
EBA.				12	Layanan	184.122.075
Layanan Dukungan Manajemen Internal	994.			6	Layanan	163.501.128
	Layanan Perkantoran	DKI Jakarta, Jatim, Sumut, Kaltim, Sulsel, Papua Barat	001. Gaji dan Tunjangan			132.614.437
		DKI Jakarta, Jatim, Sumut, Kaltim, Sulsel, Papua Barat	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor			30.886.691
	996.			6	Layanan	19.595.947
	Layanan Umum	DKI Jakarta	063. Layanan Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik			7.276.494
			064. Layanan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana			7.319.053
		Jatim, Sumut, Kaltim, Sulsel, Papua Barat	062. Layanan Dukungan Manajemen Satker			5.000.000
EBB.				1	Unit	3.825.400
Layanan Sarana Internal	951.			1	Unit	3.825.400
	Layanan Sarana Internal	DKI Jakarta	051. Pengadaan Kendaraan Bermotor			1.125.400
			052. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			600.000
			053. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			600.000
			054. Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan			1.500.000
					Total	186.922.075

Lampiran 3. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Gakkum LHK di lingkup Setditjen Gakkum LHK

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen	Target 2022	Satuan	Anggaran ('000)
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	994. Layanan Perkantoran	001. Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	38.768.702
		002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor			32.391.367
					7.377.335
	996. Layanan Umum	063. Layanan Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik	1	Layanan	14.595.547
		064. Layanan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana			7.276.494
					7.319.053
EBB. Layanan Sarana Internal	951. Layanan Sarana Internal		1	Unit	3.825.400
				Total	58.189.649



Lampiran 4. Sarana dan Prasarana Setditjen Gakkum LHK

No	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Jeep	3
2	Mini Bus	10
3	Pick Up	26
4	Sedan	2
5	Sepeda Motor	13
6	Sepeda Motor Patroli	2
7	Station Wagon	4
8	Kapal Patroli Cepat	2
9	Kapal Patroli Pantai	1
10	Pistol	3
11	Pistol Mitraliur (Sub Machine Gun)	1
12	Senapan Angin	3
13	Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang Lainnya	18
14	GPS	9
15	Helm Tempur	1
16	Rompi Anti Peluru	1
17	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	6
18	Camera Conference	2
19	Camera Digital	29
20	Camera Film	7
21	GPS Receiver	1
22	Head Set	1
23	Kamera Udara	3
24	LCD Monitor	18
25	Teropong/Keker	2
26	Video Processor	9
27	Voice Recorder	3
28	Handy Talky (HT)	5
29	Telephone Mobile	1
30	Telepon Satelit	2
31	Wireless Amplifier	2
32	Lap Top	94
33	Note Book	2
34	P.C Unit	5
35	PC Workstation	1
36	Tablet PC	8